Jl. Malabar No.22, RT.5/RW.07, Tegallega,
Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa
Barat 16151
Tel. (0251) 8374048

Tommy Apriando

EMAS HITAM DALAM CENGKERAMAN PARA HAJI:

Dari Pesta Pora, Kuasa Modal, Hingga Ancaman Meratus

1/ Pendahuluan

Pada 11 Februari 2018, seorang pengusaha tambang dan sawit, Haji Muhammad Hatta atau biasa disapa Haji Ciut, menggelar hajatan besar pesta resepsi pernikahan anaknya di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tidak tanggung-tanggung, pengantinnya diarak menggunakan mobil mewah harga milyaran, serta memboyong para artis nasional sebagai hiburan. Media lokal dan nasional ramai memberitakan pesta mewah yang dihelat selama sepuluh hari non stop tersebut. [1]

Haji Ciut merupakan salah satu nama dari serangkaian orang kaya di Tanah Banua, Kalimantan Selatan, yang dikenal sebagai salah satu "Raja Tambang Batu Bara" di Kalimantan Selatan, sekaligus salah satu pemilik perusahaan tambang batubara PT. Batu Gunung Mulia Binuang.

Haji Ciut hanya satu diantara para "Haji" lain pengusaha batubara di Kalimantan Selatan yang hidup mewah, bergelimang harta di tengah kerusakan lingkungan dan kemiskinan masyarakat sekitarnya.

Ada banyak Haji kaya lainnya di Kalimantan Selatan yang ziarah ke tanah suci melalui eksploitasi batubara, diantaranya: Abdussamad Sulaiman atau kerap dipanggil Haji Leman, Drs Zaini Mahdi yang akrab disapa Haji Ijai, Muhammad Ramlan dikenal Haji Ramlan dan satu lagi sosok haji yang paling dikenal di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yakni Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal Haji Isam. Yang terakhir, CEO Jhonlin Group ini selain memiliki tambang batubara seluas lebih dari 13 ribu hektar, juga mengembangkan bisnis di sektor

1 Lihat https://regional.kompas.com/read/2018/02/13/12241161/heboh-pesta-pernikahan-anak-pengusaha-tambang-nonstop-10-hari-ada-ayu-ting?page=all

lainnya yakni kebun sawit, perkapalan dan transportasi udara.

Berbeda dengan dahulu kala. Seperti dicatat banyak sumber sejarah, Kalimantan Selatan dikenal sebagai pusat kebudayaan Islam di pulau Kalimantan yang melahirkan Syeikh Arsyad al-Banjari, Ulama besar yang sangat masyhur di Nusantara. Kini, Kalimantan Selatan lebih banyak dikenal masyarakat sebagai kampung para haji kaya yang disebut "Haji Batubara" beserta lubang-lubang tambangnya. Bahkan bila ditotal secara keseluruhan luasan wailayahnya, setengah dari wilayah Kalimantan Selatan telah dikuasai perusahaan ekstraktif. Dari 3,7 juta hektar luas Kalimantan Selatan, 50 persen wilayahnya telah dibebani perizinan industri ekstraktif perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara.

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2015, sumber daya batubara di Kalimantan Selatan mencapai 32.954 juta ton dengan cadangan 7.291 juta ton. Secara umum total sumber daya batubara di Kalimantan Selatan sebanyak 55.825 juta ton dengan cadangan 19.426 juta ton.

Melalui analisa tumpang tindih izin tambang dengan penggunaan lahan yang ada di Kalimantan Selatan. Dari total izin tambang seluas 1.183.430,90 hektar, seluas 8.777,38 hektar izin tersebut berada di wilayah pemukiman (termasuk transmigrasi). Seluas 251.726,03 hektar izin tambang berada di wilayah pertanian dan perikanan. Seluas 464.921,00 hektar izin tambang berada di 34 kawasan hutan, dan seluas 46.789,00 hektar izin tambang berada di Wilayah Adat.

03
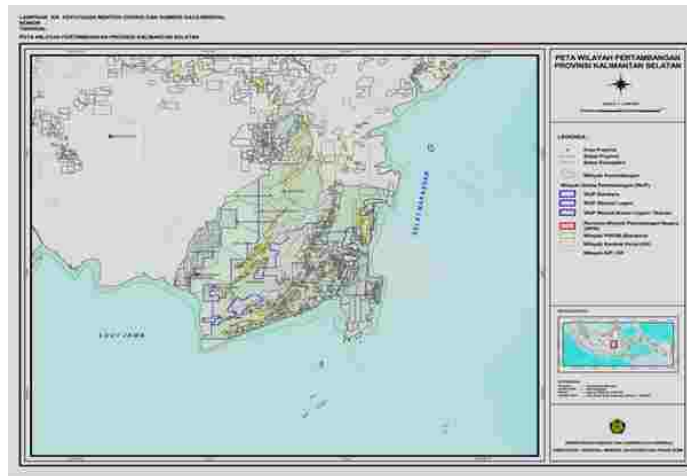
Izin-izin tambang tersebut berada di atas ruang hidup masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Izin pertambangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada perusahaan-perusahaan skala besar seperti milik para haji inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan melucuti kedaulatan masyarakat atas tanah dan airnya yang dimonopoli oleh segelintir orang. Bahkan, seringkali bisnis perusahaan melalui operasi pertambangan dan logika pembangunan yang berorientasi akumulasi kapital yang direncanakan pemerintah menjadi alasan untuk mengorbankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

04

Sementara itu, data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan menyebutkan, seluas 399 ribu hektar atau 41 persen dari 984.791 hektar kawasan hutan di Kalimantan Selatan telah dikuasai izin tambang. Dengan demikian, 41 persen hutan di Pegunungan Meratus dan hutan lainnya di Kalimantan Selatan dibebani izin tambang. Faktanya, dalam kawasan hutan tersebut terdapat sungai, yang selama ini menjadi salah sebuah tumpuan hidup sebagian besar masyarakat. Hal tersebut juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya air di Kalimantan Selatan. Bahkan diperkirakan ratusan kilometer sungai sudah berubah menjadi areal pertambangan.

Tidak hanya sumber air. Pertambangan juga telah mengancam kawasan pegunungan Meratus. Kini, tambang telah menguasai 33 persen luas Kalimantan Selatan dan 17 persen lainnya dikuasai izin perkebunan. Parahnya lagi data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melalui citra setelit, menemukan sebanyak 814 lubang di Kalimantan Selatan milik 157 perusahaan tambang batubara. Sebagian lubang berstatus tambang aktif, dan sebagian lagi telah ditinggalkan tanpa reklamasi.

2/

Para Haji Batubara

Haji Isam

Sebagian besar masyarakat di Kalimantan Selatan, mengenal haji kaya bernama Haji Isam, sapaan akrab Andi Syamsuddin Arsyad. Ia dan keluarganya dikenal sebagai pengusaha kelas kakap di tingkat nasional.

Pengusaha yang mengawali karirnya sebagai supir truk tersebut, kini memiliki banyak bisnis usaha. Perusahaan yang kini dimiliki Haji Isam di antaranya PT Jhonlin Grup, yakni PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, dan PT Jhonlin Air Transport. Dari perusahaan tersebut, Ia bisa menambang hingga 400 ribu ton batubara per bulan dan meraup omzet hingga Rp 40 miliar per bulan.

- PT JHONLIN GROUP
  PT Jhonlin Group yang berkantor pusat di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, merupakan perusahaan terbesar Haji Isam. Perusahaan ini memiliki beberapa lini bisnis dan unit usaha yang bergerak di berbagai bidang. Misalnya, bidang pertambangan batubara, jasa pelabuhan, bongkar muat di laut lepas, dan bisnis infrastruktur.

- PT JHONLIN AGRO MANDIRI
  PT Jhonlin Agro Mandiri menjadi lini bisnis penting Haji Isam di bidang pengolahan karet dan minyak sawit mentah.

- PERSEWAAN JET PRIBADI
  Jet pribadi yang dimiliki Haji Isam jumlahnya cukup banyak sehingga bisa dijadikan bisnis baru khusus persewaan jet pribadi.

- JHONLIN RACING TEAM
  Tak sekadar hobi, Haji Isam kini menginvestasikan banyak mobil seharga miliaran rupiah hingga mesin-mesin bengkel canggih untuk timnya, Jhonlin Racing Team.

Melalui kerajaan bisnisnya tersebut, Haji Isam bermetamorfosis menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan di Kalimantan Selatan, bahkan nasional. Pada Pilpres 2019 lalu, Ia menjadi wakil bendara Tim Pemenangan Nasional Jokowi-Ma'ruf. Ia juga diduga kuat sebagai pemodal dalam setiap pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan. Ia juga merupakan sepupu dari mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Majalah Tempo, sempat mengangkat sosok keduanya berkongkalingkong dalam bisnis gula di Sulawesi Utara.

07

Haji Ciut

Haji Muhammad Hatta atau Haji Ciut, selain mempunyai bisnis tambang batubara juga punya perusahaan otomotif bernama PT Harapan Binuang Motor. Nama Haji Ciut mulai disebut-sebut publik usai munculnya pernikahan anaknya yang luar biasa heboh. Pria kaya raya itu menggelar hajatan bertema Gemerlap Hiburan Rakyat dengan mengundang Rhoma Irama, Ayu Ting Ting, Afgan, Zaskia Gothic, Wali Band, Team Lo, dan lainnya. Sebagai seorang yang tajir melintir, Haji Ciut juga dikabarkan memiliki rumah bak istana dan koleksi mobil yang fantastis.

08

Haji Ijai

Haji Zaini Mahdi atau yang akrab dipanggil Haji Ijai merupakan kakak kandung dari Haji Ciut. Kedua bersaudara ini seringkali disebut sebagai ikon Kota Binuang. Ia memimpin sebuah perusahaan bernama PT Batu Gunung Mulia yang kabarnya sanggup memproduksi 2 ton batubara dalam setahun.

Setelah ijin pertambangan Batu Gunung Mulia habis di tahun 2014, kedua kakak beradik ini mendirikan PT Binuang Mitra Bersama. Kabarnya, mereka tidak hanya mengantongi izin pertambangan, melainkan juga trading. Artinya, mereka juga bisa melakukan jual beli batubara! Tidak heran kalau keduanya dikabarkan punya rumah yang di dalamnya ada helipad. Klien tetap mereka di antaranya PT Kalimantan Prima Persada/KPP (anak usaha dari PT Pama Persada Nusantara), PT Pama Persada Nusantara, Semen Indonesia, PLN, dan industri lainnya.

3/

#SaveMeratus:

Sebuah Kisah Perlawanan Rakyat

Jika para haji seperti Haji Leman, Haji Ijai, Haji Ciut, Haji Leman, dan Haji Isam, tengah berlomba-lomba menumpuk kekayaan dengan mengeksploitasi batubara atau emas hitam di Kalimantan Selatan. Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) justru tengah berjuang menyelamatkan lingkungannya, terutama kawasan pegunungan Meratus dari eksploitasi tambang batubara. Sebagai bentuk pernyataan sikap masyarakat menolak

kehadiran tambang di kawasan Pengunungan Meratus, pemerintah daerah beserta para tokoh agama dari berbagai ormas seperti NU, Muhammadiyah dan MUI, menggelar Istighosah di kota Barabai untuk menyelamatkan Pegunungan Meratus dari pertambangan dan perkebunan sawit.

Gerakan yang kelak dikenal luas dengan nama #SaveMeratus, menjadi spirit bersama semua unsur masyarakat dan pemerintah HST dalam rangka menyelamatkan ruang hidup Kabupaten HST dari segala bentuk perusakan yang berpotensi membawa bencana bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Menurut Plt Bupati HST Haji Chairansyah, sikap pemerintah daerah tetap menolak eksploitasi tambang batubara, sesuai aspirasi mayoritas masyarakatnya. Pemerintah HST tidak pernah menyetujui ijin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Menariknya, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten HST Wajihudin secara tegas menyatakan merekomendasikan fatwa mengharamkan pertambangan batubara, tidak hanya di HST, tapi juga Kalimantan Selatan. Menurutnya, rekomendasi fatwa haram terhadap pertambangan batubara bakal mendapat dukungan penuh dari MUI Provinsi. MUI Kalimantan Selatan setuju bahwa alih kelola area hutan menjadi kawasan tambang merupakan bagian dari perusakan lingkungan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan MUI telah mengeluarkan tiga fatwa mengharamkan perusakan lingkungan dan turut mendukung gerakan #SaveMeratus,[2] yang menjadi perwujudan perlawanan warga Kabupaten HST terhadap rencana pertambangan batubara oleh PT. Mantimin Coal Mining (MCM) atas restu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

2 Diakses dari Apahabar.com link https://apahabar.com/2019/06/save-meratus-ulama-hst-mantap-haramkan-pertambangan-batu-bara/

Kala itu, Pada 4 Desember 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) mengeluarkan izin operasi Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) melalui Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DBJ/2017. Area konsesi yang dimiliki perusahaan tambang asal India ini meliputi Kabupaten Balangan, Tabalong, dan Hulu Sungai Tengah, dengan luas mencapai 5.908 hektar. 1.900 hektar di antaranya terletak di Pegunungan Meratus.

Luasan izin tambang batubara yang mengintai Meratus seluas 1.398,78 hektar dan berada di hutan sekunder: permukiman seluas 51,60 hektar, sawah seluas 147,40 hektar, dan sungai seluas 63,12 hektar. Dari catatan Walhi, PT MCM telah menguasai lahan seluas 5.900 hektar. Bahkan izinnya di Kabupaten HST berada tidak jauh dari Bendungan Batang Alai, yang masuk dalam proyek strategis nasional terkait ketahanan pangan.

Temuan lain di lapangan menunjukkan bahwa ekosistem pegunungan karst di Kalsel mencapai 610.766 hektar. Dimana dari luas tersebut, sebanyak 356.552 hektar di antaranya kini dibebani izin tambang. Dari total luas hutan Kalimantan Selatan (984.791 hektar), sebanyak 399.000 hektarnya, kini dibebani izin tambang. Bila ditotal keseluruhan izin tambang di Kalimantan Selatan mencapai 1,2 juta hektar atau 33 persen dari seluruh luas Kalimantan Selatan sebesar 3,7 juta hektar. Sementara total izin perkebunan kelapa sawit mencapai 618,7 ribu hektar, atau 17 persen dari luas Kalimantan Selatan.

4/

Siapa Untung di Meratus?

Hutan Meratus menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati bernilai ekologis dan ekonomis. Hasil hutan terutama non kayu telah dimanfaatkan masyarakat di Meratus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Tanaman bernilai etnobotani jika dimanfaatkan sebagai obat-obatan mampu memenuhi kebutuhan pengobatan alternatif bermacam penyakit. Hutan sebagai penyerap karbon dan penyedia air bersih akan terganggu fungsinya seiring dengan makin berkurangnya luasannya oleh operasi tambang dan perkebunan. Seperti diketahui banyak orang, Meratus merupakan hulu berbagai sungai. Lebih dari 5.600 kilometer sungai melintas dan berasal dari Pegunungan Meratus. Sungai-sungai inilah yang kemudian di bagian tengahnya diracuni oleh pencemaran yang diproduksi tambang batubara. Dengan demikian, aktivitas tambang batubara dari hulu ke hilir telah merusak lingkungan. Tambang yang berada di hulu merusak hutan. Sedangkan yang berada di bagian tengah dan hilir mencemari air sungai.

Selain itu, tambang batubara juga mengancam pegunungan kapur atau ekosistem karst. Di Kalimantan Selatan, pegunungan karst merupakan bagian dari Pegunungan Meratus. Karst memiliki fungsi ekologi sebagai aquifer alami atau tandon raksasa yang mampu menampung dan mengalirkan air bagi keberlangsungan ekosistem dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Jika tambang batubara berproduksi di kawasan karst. Maka, selain mendapatkan

batubara di bawahnya juga mendapatkan gamping dan batuan karst di atasnya. Ini artinya pertambangan batubara telah menjadi ancaman sangat berarti bagi kelanjutan kehidupan secara keseluruhan. Fakta-fakta di atas menunjukkan, kerusakan ekologi juga berarti kerugian ekonomi dalam jangka pendek maupun panjang. Sebab hancurnya ekosistem, musnahnya keanekaragaman hayati, tercemarnya sumber-sumber air tidak lain adalah penggalian lubang kubur bagi keseluruhan kelangsungan kehidupan. Sayangnya, dalam nalar ekonomi kapitalisme itu semua tak pernah menjadi perhitungan. Perhitungan satu-satunya hanyalah akumulasi kapital *again and again*, tanpa batas.

Selain PT. Mantimin Coal Mining yang saat ini posisinya menang melawan warga setelah izinnya digugat, ada perusahaan lain yang ikut mengancam bahkan sudah menambang gunung Meratus, yakni PT. Adaro Indonesia dan PT. Antang Gunung Meratus. Saat ini 58 persen atau lebih dari setengahnya telah dibebani izin tambang yang kapan saja bisa beroperasi. Lantas siapa pemilik dan yang diuntungkan dari pertambangan batubara di Meratus?

PT. Mantimin Coal Mining

Perusahaan PT. Mantimin Coal Mining merupakan Perusahaan Modal Asing (PMA) dengan pemilik saham mayoritas PT. Bangun Asia Persada dan pemilik saham minoritas PT. Hasnur Jaya Tambang. Pengusaha bernama Amit Canguly, duduk sebagai direktur dan Annop Kishore Seth sebagai komisaris perusahaan asal India tersebut.

Sementara PT. Bangun Asia Persada merupakan Perusahaan Modal Asing (PMA) dengan pemilik saham mayoritas ILFS Maritime Offshore PTE LTD dari Singapura dan pemilik saham minoritas IL & FS Offshore Natural Resources PTE LTD yang juga asal Singapura. Amit Canguly diposisi Presiden Direktur, Nangamangalam Kandhadai Balaji diposisi direktur dan

Kumas Ashwani sebagai komisaris. Ketiganya merupakan Warga Negara asal India.

PT. Hasnur Jaya Tambang dimiliki oleh PT Hasnur Jaya Utama milik Haji Abdussamad Sulaiman atau kerap dipanggil Haji Leman dan Haji Basirun. Haji Leman merupakan pemilik Hasnur Grup, grup perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan, transportasi, perkapalan, pelabuhan khusus batubara, dokking, properti, dan multimedia. Haji Leman wafat pada 14 Juni 2015. Karir politiknya menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar).

Adapun Direktur Utama perusahaan tersebut dijabat putra kandung Haji Leman yakni Zainal Hadi Has. Ia juga menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Selatan dan pemilik Persatuan Sepakbola Barito Putera. Putrinya Hasnuryani menjabat sebagai direktur.

Rachmadi Has selaku putra Haji Leman menjabat komisaris utama, dan putrinya Jayanti Sari menjabat komisaris.

Sementara perusahaan PT. Hasnur Jaya Utama merupakan anak perusahaan Hasnur Grup dan pemilik saham perusahaan ini dimiliki oleh keluarga Haji Leman. Jayanti Sari (putri Haji Leman) diposisi Direktur Utama dan pemilik saham, Zainal Hadi Has (Putra Haji Leman) sebagai direktur dan pemilik saham, Yuni Abdi Nur Sulaiman (Putri Haji Leman) menjabat direktur dan pemilik saham. Istri alm Haji Leman, Hasnuryani menjabat direktur dan pemilik saham. Rachmadi Has sekalu putra Haji Leman menjabat komisaris utama. Putri Haji Leman Hajah Nila Susanti Zulfikar menjabat sebagai komisaris dan pemilik saham.

Hasnuryadi Sulaiman, putra Haji Leman yang juga anggota legislatif dari Partai Golkar daerah pemilihan Kalimantan Selatan menjabat pemilik saham dan komisaris. Sementara itu, Mantan Kepala Staf TNI, Djamari Chaniago berada di posisi komisaris dan Mayjen TNI (Purn) Suroyo Gini menjabat

direktur. Drs. Indro Hananto, menantu Haji Leman yang juga mantan anggota legislatif DPR RI 2014-2019 menjabat sebagai komisaris.

PT. Antang Gunung Meratus

Perusahaan PT. Antang Gunung Meratus merupakan anak perusahaan Baramulti Suksesarana, konsesinya seluas 22.433 hektar. PT Antang Gunung Meratus, selaku Pemegang Kuasa Perjanjian Karya Perusahaan Tambang Batubara yang secara administratif berlokasi di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Saat ini perusahaan tersebut dalam proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) di Kabupaten HST untuk meningkatkan kapasitas produksi batubara. Dari yang awalnya memproduksi 10.000.000 ton per tahun, menjadi 25.000.000 ton per tahun, yang terintegrasi dengan jalan angkutan, dermaga, terminal khusus batubara serta fasilitas penunjang lainnya. [3]

Kawasan yang diajukan PT Antang Gunung Meratus merupakan daerah tangkapan air untuk irigasi di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten HST. Luasannya, mencapai 4.000 hektar. Karena itu, tidak menutup kemungkinan bencana banjir akan terus terjadi di musim penghujan, serta kekeringan di saat musim kemarau, akibat rusaknya sumber daya air di kabupaten HST.

[3] Diakses dari https://kalsel.prokal.co/read/news/21795-hst-menolak-aktivitas-pertambangan-pt-antang-gunung-meratus

Ancaman Bencana Ekologi dan Lingkungan Hidup

Seluruh tahap pertambangan batubara memiliki dampak merusak lingkungan hidup dan sistem alami di mana tambang itu beroperasi. Masyarakat setempat hidup dan penghidupannya bergantung sebagian atau sepenuhnya kepada tanah dan kekayaan alam. Di situlah seluruh tahap operasi tambang mengakibatkan penurunan mutu dan pelenyapan kehidupan masyarakat.

Kerusakan yang terjadi dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Kerusakan langsung terlihat pada saat kejadian, dampaknya segera, dan meliputi wilayah yang jelas. kerusakan langsung akibat tambang batubara misalnya hilangnya hutan akibat pembukaan lahan atau land clearing. Lalu, kerusakan langsung dapat menjadi kerusakan tidak langsung, seperti hilangnya hutan mengakibatkan air sungai keruh dan kerap menimbulkan banjir di daerah hilir.

Aspek ekologi dapat disetarakan dengan berlangsungnya siklus air, pangan dan energi, tiga kebutuhan mendasar penunjang kehidupan. Daya rusak tambang batubara pada aspek ini terjadi pada tahap produksi, yakni dirombaknya bentang alam (landscape), pencemaran terhadap tata air setempat, dan pencemaran udara.

Semua proyek pertambangan terutama tambang terbuka memerlukan lahan dalam jumlah besar. Lahan itu digali menjadi lubang tambang, sejumlah lainnya digunakan untuk sarana pendukung. Lahan dengan ukuran memanjang hingga puluhan kilometer digunakan untuk jalan pengangkutan yang

membelah dan merombak hutan, sawah, dan rawa. Seperti jalan tambang PT Adaro yang dibangun membelah rawa dan persawahan warga, juga membongkar lahan transmigrasi di Kabupaten Tabalong hingga penduduknya kini terusir.

Pembukaan lahan tambang batubara mengupas lapisan permukaan tanah hingga kedalaman tertentu. Tata air alami dirombak menimbulkan gangguan bahkan rusaknya tata air setempat. Persediaan air bagi warga menurun kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, timbul risiko bencana longsor hingga banjir.

Tanah longsor menimbulkan kerugian besar bagi warga. Salah satu contohnya terjadi di Desa Kintap Lama, Kabupaten Tanah Laut di tahun 2017. CV Darta Katama Jaya (DKJ) yang mengantongi izin tambang batubara dari Bupati Tanah Laut melakukan penambangan dengan jarak hanya 50 sampai dengan 100 meter dari sungai Kintap. Selain melanggar peraturan, tambang ini menimbulkan bencana ekologi hanya beberapa tahun setelah beroperasi. Satu hektar longsoran tanah meruntuhkan semua yang ada di atasnya.

Pada Minggu 18 Juni 2017, longsornya tanah yang membatasi lubang tambang dan sungai Kintap membuat air sungai memenuhi lubang tambang seluas 12,27 hektar dalam waktu sekitar 1,5 jam. Menurut warga, lubang tambang memiliki kedalaman 40 meter, sehingga volume lubang tambang adalah 4.920.000 m3 atau 4,92 miliar liter. Itu artinya air sungai yang mengalir ke lubang tambang dengan kecepatan 992.593 liter/detik. Longsor dan besarnya debit air yang mengalir menengelamkan puluhan rumah dan perahu warga yang bertambat di Sungai Kintap.

Selain bencana ekologi yang sifatnya langsung, tragedi ini juga menyisakan dampak tidak langsung dari kehilangan rumah, tanah, dan lahan yang dialami warga desa.
Mereka harus mencari tempat baru untuk memulihkan kehidupan seperti sedia kala. Ganti rugi yang diberikan pun tidak sebanding dengan nilai kehilangan. Bahkan ada kehilangan yang tak bisa dinilai, yaitu hilangnya sesuatu yang sifatnya "non use value" seperti ingatan suasana kampung halaman, kenangan masa kecil, dan keindahan alam.

Bencana banjir di wilayah hilir dari pertambangan terjadi berulang kali dalam beberapa tahun terakhir. Kabupaten Tanah Bumbu, wilayah dengan izin tambang nomor dua terbanyak di Kalimantan Selatan mengalami banjir dengan luasan terbesar.
Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Lambung Mangkurat (PPIDS ULM) menyebutkan genangan banjir di Tanah Bumbu seluas 4.252 hektar. Menurut mereka, perhitungan yang dilakukan dari ekstraksi citra satelit Sentinel 1 ini bisa saja under estimate, bisa jadi banjir di lapangan lebih luas dari perkiraan.
Selain Tanah Bumbu, Kotabaru juga mengalami banjir cukup besar, yakni 2.380 hektar genangan. Wilayah dengan izin tambang terbesar ini menempati urutan kedua luasan banjir setelah tanah bumbu.

Kejadian banjir di wilayah hilir berkaitan dengan penggundulan hutan dan perombakan lahan di wilayah hulu. Dari analisa data spasial yang dilakukan Walhi Kalsel, kebanyakan tambang berada di wilayah hulu telah membuka lahan dan menyisakan lubang tambang. Dengan pendekatan hidrologi sederhana dalam sistem Daerah Aliran Sungai (DAS), rusaknya ekosistem alami di daerah hulu yang berfungsi sebagai area tangkapan air (catchment area), menyebabkan kelebihan air di daerah hilir yang berujung pada banjir.

Ada 814 lubang tambang milik 157 perusahaan tambang batubara di Kalimantan Selatan. Sebagian lubang berstatus

tambang aktif, dan sebagian lagi telah ditinggalkan tanpa reklamasi. Jarak lubang tambang dan tempat hidup warga dalam hal ini permukiman jaraknya bervariasi. Di Desa Kintap Lama di mana terjadinya longsor yang dijelaskan di muka, lubang tambang hanya berjarak kurang dari 20 meter dari rumah warga.

Tabel I. Data Lubang Tambang

NO	KABUPATEN	JUMLAH LUBANG TAMBANG
1.	Balangan	15
2.	Banjar	171
3.	Hulu Sungai Selatan	7
4.	Kota Baru	59
5.	Tanah Bumbu	264
6.	Tanah Laut	223
7.	Tapin	52
	TOTAL	841

Izin-izin tambang batubara pada tahap produksi mengeruk batubara di bawah lapisan tanah produktif. Meninggalkan lubang tambang yang tidak bisa ditutup, merubah rona, dan menyisakan rusaknya bentang alam yang tidak terpulihkan. Batubara diambil melebihi banyaknya jumlah tanah bagian atasnya, sehingga tidak cukup tanah untuk menutupi lubang yang tersisa. Pengerukan batubara menyisakan kerusakan yang berujung pada kerusakan ekologi lainnya.

Lubang tambang menganga berisi air asam tambang berbahaya. Logam berat yang terkandung di dalamnya pada banyak kasus tidak mampu dikendalikan. Banyak ditemukan bocornya air asam tambang ke sumber air yang digunakan masyarakat di sekitar tambang batubara. Investigasi Greenpeace Indonesia dan Walhi Kalimantan Selatan tahun 2014 menemukan kasus pencemaran sungai-sungai di sekitar lubang tambang.

Kasus longsornya lahan dan permukiman di dekat lubang tambang berpotensi terjadi lagi. Ada 8.700 hektar izin tambang berada di wilayah permukiman, dalam izin itu ada 116 hektar permukiman yang sudah terganggu aktivitas pertambangan, beberapa diantaranya digusur tanpa relokasi, dan yang lainnya pindah setelah diganti rugi. Kasus ini terjadi di Desa Wonorejo, Kabupaten Balangan.

Penggusuran ruang hidup rakyat adalah bagian dari perombakan bentang alam. Bentang alam yang dirombak bisa berupa ladang, perkebunan dan sumber air milik warga. Desa Wonorejo menjadi contoh kasus lahan dan pengrusakan sumber air oleh PT Adaro yang beroperasi di wilayah Kabupaten Balangan.

Longsornya lahan dan permukiman, rusaknya sungai dan sumber air masih mungkin terjadi. Ada 32.717 km sungai besar dan kecil melintas di Kalimantan Selatan. 25% dari total panjang sungai itu, diatasnya terdapat izin tambang. 335 km dari seperempat total sungai tersebut telah menjadi lubang tambang.

Kebanyakan sungai kecil di bagian hulu telah berubah menjadi lubang tambang. Sungai kecil merupakan cabang dari sungai besar di hilirnya. Sungai-sungai yang berada dalam izin tambang ikut dibongkar saat pembukaan lahan sehingga menghancurkan pola aliran alaminya.

Erosi akibat penghancuran tanah dan terlarutnya logam berat dari tambang kemudian mencemari sungai dengan kadar yang membahayakan. Baku mutu air menurun hingga tidak layak konsumsi.

Laporan investigasi Greenpeace Indonesia dan Walhi Kalimantan Selatan tahun 2014 menunjukkan air dan sungai-sungai di Kalimantan Selatan tercemar logam berat

batubara. Investigasi yang dilakukan di dalam dan sekitar konsesi tambang perusahaan besar di Kalimantan Selatan menemukan bocoran air asam tambang dari lubang dan kolam pengendapan yang mengalir ke sungai-sungai kecil.

Di Konsesi PT Tanjung Alam Jaya misalnya, ditemukan sebuah bocoran air asam tambang (pH 3,74) yang mengalir ke sungai warga dari dinding lubang yang terbengkalai. Di PT Jorong Barutama Greston, sebuah kolam asam (pH 3,74) sepanjang 2 kilometer terbentang dari bekas lubang tambang, dan terdapat kebocoran. Di tambang PT Arutmin, terdapat kolam asam (pH 2,34) yang berada tepat di samping jalan warga menuju Desa Salaman, kandungan logam besinya 40 kali melampaui batas regulasi. Begitu juga di PT. Arutmin, kolam asamnya (pH 2,32) meluap dengan kandungan logam mangan 10 kali melampaui batas regulasi.

Di berbagai negara, para ilmuan telah membuktikan bahwa tambang batubara menyebabkan pencemaran air. Secara umum, dampak dari air asam tambang terutaman tambang yang ditinggalkan meliputi kontaminasi air minum dan suplai air industri, membunuh atau mengganggu pertumbuhan dan reproduksi flora dan fauna, membatasi fungsi sungai dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, menurunkan hasil pertanian dan perikanan, dan penurunan nilai lahan yang berada di sekitar badan air yang tercemar air asam tambang.

Data-data di muka menunjukkan aktivitas pertambangan batubara telah merusak aspek ekologi, yakni mengganggu siklus hidrologi hingga terjadi banjir, mencemari air dan merusak faktor-faktor alami yang mempengaruhi keberadaan air.

Rusaknya air secara tidak langsung akan mempengaruhi aspek lain. Pemenuhan pangan dan aktivitas pertanian secara mikro dan makro akan terganggu akibat dari rusaknya air. Selain rusaknya lahan pertanian yang tergusur langsung, menurunnya kualitas air akan berdampak pada menurunnya hasil pertanian dan perikanan setempat.

Dalam kondisi ini, jika ekspansi tambang batubara terus berlanjut, maka ruang hidup dan faktor-faktor pendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan rusak dalam waktu yang belum pernah diperkirakan.

6/

Catatan Akhir

Dampak pertambangan batubara secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi telah merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir orang. Karena itu, para pengambil kebijakan, tokoh agama dan seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan, sebagaimana telah ditunjukkan oleh masyarakat HST, harus konsisten untuk menolak pertambangan batubara dan perkebunan sawit yang akan mengancam kerusakan lingkungan dan keberlagsungkan hidup masyarakat, terutama di sekitar dan kawasan Pegunungan Meratus. Perlu segera didorong adanya moratorium izin pertambangan batubara di provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen daerah melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman bencana sosial ekologi yang diakibatkan tambang batubara.